

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik pada DPMPTSP Kota Pekanbaru

Ikbal Khair¹ Ema Fitri Lubis²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia.
ikbalkhair@student.uir.ac.id emafitrilubis@soc.uir.ac.id

Received : 15 Juni 2025

Abstract

The Mobile Electronic Licensing Management Information System (SIMOLEK) has been implemented at the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) of Pekanbaru City. This study aimed to assess the extent to which SIMOLEK has been implemented in accordance with the applicable regulations and to identify the challenges encountered during its execution. The research employed a descriptive quantitative method. The population included the Head of DPMPTSP, licensing and non-licensing service officers, and members of the public using SIMOLEK. Sampling techniques used were purposive sampling and accidental sampling. Both primary and secondary data were collected through questionnaires, interviews, observations, and documentation. The data were analyzed descriptively using a Likert scale. The study referred to Pekanbaru Mayor Regulation No. 117 of 2017 on SIMOLEK service procedures and standards, as well as Mayor Regulation No. 118 of 2017 on the delegation of authority in licensing and non-licensing services. The results showed that the implementation of SIMOLEK was categorized as Moderately Implemented, with challenges such as lack of public outreach, low digital literacy, and inadequate network infrastructure.

Keywords: Implementation, SIMOLEK, Licensing Services, DPMPTSP Pekanbaru City.

Abstrak

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK) telah diterapkan di DPMPTSP Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem SIMOLEK dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian meliputi Kepala Dinas DPMPTSP, petugas layanan perizinan dan nonperizinan, serta masyarakat pengguna SIMOLEK. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan accidental sampling. Data primer dan sekunder diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan skala Likert. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2017 tentang prosedur dan standar layanan SIMOLEK, serta Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMOLEK termasuk dalam kategori Cukup Terimplementasi dengan beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi teknologi masyarakat, serta belum optimalnya infrastruktur jaringan.

Kata kunci: Implementasi, SIMOLEK, Layanan Perizinan, DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam berbagai kebijakan nasional, seperti

yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam aspek pelayanan perizinan. Perizinan digital dinilai sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) serta efektivitas investasi di daerah. Idealnya, sistem perizinan berbasis digital dirancang untuk memangkas jalur birokrasi yang panjang, mengurangi interaksi tatap muka yang rawan terhadap praktik pungutan liar, serta memberikan kepastian terkait waktu dan biaya layanan. Platform perizinan digital juga seharusnya mengedepankan prinsip kemudahan penggunaan (*user-friendly*), efisiensi, keterpaduan lintas instansi, serta aksesibilitas yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengembangkan dan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK). Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan izin secara daring, sehingga mereka tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan. SIMOLEK menyediakan berbagai fitur utama, seperti registrasi permohonan, pelacakan status izin, informasi tahapan prosedural, hingga kanal pengaduan dan layanan pelanggan. Aplikasi ini mencakup 38 jenis layanan perizinan dari berbagai sektor strategis, yang diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SIMOLEK menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul di antaranya adalah rendahnya literasi digital masyarakat dalam memahami alur layanan SIMOLEK, kompleksitas prosedur pengajuan izin, ketidaksesuaian dokumen yang tidak direspons secara jelas oleh sistem, hingga sistem notifikasi yang belum optimal. Di sisi lain, kesiapan SDM pelaksana layanan pun masih menjadi tantangan, mengingat belum semua petugas memahami teknis aplikasi secara menyeluruh. Selain itu, sinergi antarinstansi dalam pemrosesan izin digital juga belum sepenuhnya terintegrasi. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan SIMOLEK juga masih terbatas, sehingga banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya manfaat serta prosedur penggunaannya.

Melihat berbagai fenomena tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan perizinan digital melalui aplikasi SIMOLEK oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana implementasi kebijakan ini dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas layanan perizinan digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru? dan (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SIMOLEK dalam pelayanan perizinan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Administrasi dalam konteks implementasi kebijakan publik tidak sekadar dipahami sebagai tata usaha atau dokumentasi teknis, melainkan sebagai suatu bentuk kolaborasi yang terorganisir dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Silalahi (2010), administrasi mencerminkan kerja sama antarmanusia yang terstruktur berdasarkan pembagian tugas. Dalam implementasi SIMOLEK, fungsi administrasi menjadi penting sebagai fondasi tata kelola sistem digital, baik dari aspek manajemen berkas perizinan hingga alur pelayanan yang efisien..

Konsep Organisasi

Organisasi publik seperti DPMPTSP merupakan entitas sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan pelayanan kepada masyarakat. Robbins (dalam Sopiah, 2008) menyatakan bahwa organisasi adalah sistem yang dikoordinasikan secara sadar dan memiliki struktur yang memungkinkan peran tiap aktor terdistribusi secara jelas. Relevansi konsep ini dalam implementasi SIMOLEK tampak pada struktur DPMPTSP yang dituntut untuk adaptif terhadap teknologi dan mampu membangun sinergi antar bagian, mulai dari front office hingga pengelola sistem aplikasi.

Konsep Manajemen

Dalam sistem pelayanan berbasis digital, manajemen memainkan peranan penting untuk memastikan alur kerja berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. George R. Terry dan Rue (2010) mendefinisikan manajemen sebagai proses sistematis yang mencakup perencanaan hingga pengawasan. Dalam konteks SIMOLEK, pengelolaan aplikasi ini menuntut adanya sistem manajerial yang efisien—terutama dalam distribusi tugas, pembinaan sumber daya manusia, dan pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas layanan digital.

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah dasar hukum yang menjadi acuan implementasi berbagai program pemerintahan, termasuk sistem SIMOLEK. Menurut Dunn (dalam Ali, 2007), kebijakan publik memuat arah strategis dan prinsip jangka panjang yang menjadi fondasi bagi tindakan organisasi publik. Dalam hal ini, keberadaan SIMOLEK adalah implementasi dari kebijakan nasional terkait digitalisasi perizinan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam praktik lokal oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Konsep Pelayanan Publik

UU No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara atas layanan pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, SIMOLEK hadir sebagai bentuk transformasi pelayanan publik yang mengutamakan kemudahan, keterjangkauan, dan akuntabilitas. Pelayanan digital berbasis aplikasi seperti SIMOLEK merepresentasikan upaya DPMPTSP dalam memberikan akses cepat terhadap 38 jenis layanan perizinan secara mobile.

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan adalah proses krusial yang menjembatani antara keputusan politik dan realisasi praktisnya di lapangan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008) menekankan bahwa implementasi melibatkan banyak faktor teknis dan sosial yang harus diharmonisasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel penting, yaitu kejelasan tujuan, sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi, dan kondisi eksternal. Keenam faktor tersebut menjadi alat analisis utama untuk mengkaji sejauh mana SIMOLEK diimplementasikan secara efektif oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Dalam konteks lokal, SIMOLEK sebagai aplikasi digital perizinan tentu menghadapi tantangan dalam hal adaptasi teknologi oleh pegawai, pemahaman masyarakat pengguna, hingga keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pemilihan teori Van Meter dan Van Horn dirasa relevan karena mampu memetakan faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan implementasi dengan pendekatan yang komprehensif.

Metode

Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif untuk menggambarkan implementasi SIMOLEK di DPMPTSP Kota Pekanbaru. Data dikumpulkan dari dua kelompok, yaitu pegawai instansi yang terlibat langsung dan masyarakat pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling untuk pegawai dan accidental sampling untuk masyarakat. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara kuantitatif-deskriptif dan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn, yaitu: standar & sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Tabel Rekapitulasi Tanggapan Pegawai DPMPTSP Kota Pekanbaru terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik

No.	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Standar dan Sasaran kebijakan	4 (50%)	2 (25%)	2 (25%)	8 (100%)

2	Sumber Daya	2 (25%)	6 (75%)	-	8 (100%)
3	Karakteristik Agen Pelaksana	5 (62,5%)	2 (25%)	1 (12,5%)	8 (100%)
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	3,5 (43,75%)	3,5 (43,75%)	1 (12,5%)	8 (100%)
5	Komunikasi Antar Organisasi	2,5 (31,25%)	4,5 (56,25%)	1 (12,5%)	8 (100%)
6	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	4,5 (56,25%)	2,5 (31,25%)	1 (12,5%)	8 (100%)
Jumlah		21,5	20,5	6	48
Rata-rata		3,58	3,42	1	8
Persentase		44,79%	42,71%	12,5%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2025

Tabel Rekapitulasi Hasil Tanggapan Masyarakat terhadap Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik

NO	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	KT	
1	Standar dan Sasaran kebijakan	9,5 (31,67%)	14 (46,67%)	6,5 (21,67%)	30 (100%)
2	Sumber Daya	10,5 (35%)	13,5 (45%)	6 (20%)	30 (100%)

3	Karakteristik Agen Pelaksana	10 (33,33%)	14 (46,67%)	6 (20%)	30 (100%)
4	Disposisi atau Sikap Pelaksana	6 (20%)	15,5 (51,67%)	8,5 (28,33%)	30 (100%)
5	Komunikasi Antar Organisasi	5 (16,67%)	12 (40%)	13 (43,33%)	30 (100%)
6	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	14 (46,67%)	13 (43,33%)	3 (10%)	30 (100%)
Jumlah		55	55	43	180
Rata-rata		9,17	13,67	7,17	30
Persentase		30,56%	45,56%	23,89%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian dari responden pegawai dan masyarakat terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, diperoleh gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan publik digital tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan enam indikator implementasi kebijakan dari model Van Meter dan Van Horn, yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil gabungan ini menunjukkan bagaimana sistem SIMOLEK telah diterima, dijalankan, serta dirasakan manfaat dan kendalanya oleh dua pihak utama: pelaksana dan pengguna layanan.

Pada indikator standar dan sasaran kebijakan, baik pegawai maupun masyarakat menilai bahwa arah kebijakan dan prosedur pelayanan SIMOLEK sudah cukup jelas dan dipahami. Para pelaksana umumnya menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tujuan sistem, sedangkan dari sisi masyarakat, meskipun sebagian telah memahami, namun masih diperlukan penguatan sosialisasi agar tujuan kebijakan lebih merata dipahami di seluruh lapisan pengguna layanan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah terimplementasi, tetapi efektivitas penyampaian informasinya perlu ditingkatkan.

Untuk indikator sumber daya, mayoritas pelaksana menyatakan bahwa sarana, prasarana, serta kapasitas personal telah mendukung pelaksanaan SIMOLEK. Namun, dari sisi masyarakat, masih ditemukan keterbatasan dalam hal literasi digital dan ketersediaan

pendampingan teknis, terutama bagi pengguna yang kurang familiar dengan teknologi. Artinya, sumber daya sebenarnya telah tersedia secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua kalangan.

Dalam hal karakteristik agen pelaksana, para petugas SIMOLEK dinilai cukup profesional, memahami tugasnya, dan menunjukkan etika pelayanan yang baik, baik menurut penilaian internal pegawai maupun masyarakat. Meski demikian, tetap dibutuhkan evaluasi dan peningkatan kompetensi secara berkala agar kualitas pelayanan publik berbasis digital ini bisa terjaga secara berkelanjutan, seiring meningkatnya tuntutan dan dinamika pelayanan online.

Pada indikator disposisi atau sikap pelaksana, responden dari kedua kelompok memberikan tanggapan positif terhadap sikap kerja pelaksana yang dinilai konsisten, ramah, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas. Namun, di sisi lain, masih terdapat keluhan terkait kecepatan dan responsivitas dalam menangani kendala teknis atau permintaan informasi, yang menjadi catatan penting untuk perbaikan sistem pelayanan ke depan.

Indikator komunikasi antar organisasi pelaksana masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki. Pegawai menilai koordinasi antar unit sudah berjalan cukup baik, tetapi masyarakat masih merasakan adanya perbedaan informasi atau ketidaksesuaian antara prosedur yang dijelaskan dan praktik di lapangan. Ini menandakan bahwa komunikasi internal dan eksternal belum sepenuhnya optimal, sehingga alur informasi perlu diperjelas dan diseragamkan agar tidak membingungkan masyarakat.

Terakhir, pada indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, pelaksanaan SIMOLEK mendapat dukungan yang relatif positif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, penerimaan kebijakan ini belum merata di semua segmen masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum terbiasa dengan layanan digital. Oleh karena itu, meskipun ekosistem kebijakan mendukung, perlu adanya strategi peningkatan literasi digital dan perluasan jangkauan sosialisasi agar kebijakan ini benar-benar inklusif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Mobile Elektronik (SIMOLEK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa sistem ini berada pada kategori "Cukup Terimplementasi". Artinya, sistem telah dijalankan dan memberikan manfaat, namun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat untuk mencapai efektivitas penuh dalam pelayanan publik berbasis digital. Kesimpulan ini diperoleh dari pengujian pada enam indikator utama implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan menunjukkan hasil yang positif dan masuk dalam kategori *Terimplementasi*, karena mayoritas pelaksana dan sebagian besar masyarakat telah memahami arah kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam SIMOLEK.
2. Sumber Daya berada pada kategori Cukup Terimplementasi, di mana fasilitas dan kompetensi teknis pegawai dinilai sudah cukup baik, namun sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan dalam penggunaan sistem secara mandiri.

3. Karakteristik Agen Pelaksana juga berada pada kategori Terimplementasi, dengan petugas yang menunjukkan pemahaman terhadap tugas serta sikap profesional dalam melayani masyarakat.
4. Disposisi atau Sikap Pelaksana termasuk dalam kategori Cukup Terimplementasi. Meskipun komitmen petugas telah terbentuk, respons terhadap hambatan di lapangan dinilai belum sepenuhnya optimal.
5. Komunikasi Antar Organisasi masih berada pada kategori Cukup Terimplementasi, disebabkan adanya ketidaksesuaian informasi yang dirasakan oleh masyarakat antara penjelasan petugas dan implementasi di lapangan.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik turut menunjukkan kategori Cukup Terimplementasi, mengingat penerimaan terhadap layanan digital masih belum merata di seluruh segmen masyarakat, meskipun dukungan kebijakan daerah telah mulai dirasakan.

Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan bahwa SIMOLEK sudah berada pada jalur yang benar dalam proses digitalisasi pelayanan perizinan, namun masih memerlukan upaya peningkatan dari aspek pendampingan masyarakat, respons teknis, serta konsistensi komunikasi antarlembaga agar dapat diimplementasikan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Awang, a. (2010). *implementasi pemberdayaan pemerintahan desa*. Yogyakarta: pustaka belajar.
- Bambang, h. (2013). *sistem informasi manajemen berbasis komputer*. jakarta: rineka cipta.
- Danang, S. (2013). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Denhardt, d. j. (2007). *the public service serving, not stering*. armonk, new york london, england: m.e.sharpe.
- Fariad, a. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamali, A. Y. (2019). *Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Jakarta: CAPS.
- Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Joko, W. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC.
- Jusman, I. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Koryati, N. D. (2005). *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Melayu, H. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mift, T. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mifta, T. (2008). *Ilmu Administrasi Kontemporer*. (E. Pertama, Penyunt.) Jakarta: Kencana.
- Mulyanto, H. d. (2010). *Electronic goverment pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan desa berbasis web*. *jurnal teknologi dan informasi*, 9-21.

- Samodra, W. (2009). *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, P. (2017). *ADMINISTRASI PUBLIK Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Cetakan Pertama ed.). 2003: Mandar Maju.
- Siagian, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara..
- Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Bar Algensindo.
- Siswanto. (2013). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Suwanto, d. d. (2014). *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijaksanaan Dari Segi Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wilman, S. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. (2011). *Teori Organisasi & Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkifli, d. M. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing UIR.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.

- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative

governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.

- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.

- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Awang, a. (2010). *implementasi pemberdayaan pemerintahan desa*. Yogyakarta: pustaka belajar.
- Bambang, h. (2013). *sistem informasi manajemen berbasis komputer*. jakarta: rineka cipta.
- Danang, S. (2013). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Denhardt, d. j. (2007). *the public service serving, not stering*. armonk, new york london, england: m.e.sharpe.
- Fariad, a. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamali, A. Y. (2019). *Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Jakarta: CAPS.
- Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Joko, W. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC.
- Jusman, I. (2012). *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaqa.
- Koryati, N. D. (2005). *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Melayu, H. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mift, T. (2012). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mifta, T. (2008). *Ilmu Administrasi Kontemporer*. (E. Pertama, Penyunt.) Jakarta: Kencana.
- Mulyanto, H. d. (2010). Electronic government pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan desa berbasis web. *jurnal teknologi dan informasi*, 9-21.
- Samodra, W. (2009). *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Santoso, P. (2017). *ADMINISTRASI PUBLIK Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah* (Cetakan Pertama ed.). 2003: Mandar Maju.
- Siagian, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara..
- Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Bar Algensindo.
- Siswanto. (2013). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Suwanto, d. d. (2014). *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik Dan Transparansi*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijaksanaan Dari Segi Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wilman, S. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Winardi. (2011). *Teori Organisasi & Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkifli, d. M. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing UIR.

Dokumentasi:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- Peraturan Presiden Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Walikota Pekanbaru No 117 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Mobile pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota Pekanbaru No 18 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.